



PSKP
Pusat Standar & Kebijakan Pendidikan

BUKU SAKU INDIKATOR PRIORITAS

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PENDIDIKAN

KATA PENGANTAR

Buku Saku Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan (SPM) ini disusun dengan tujuan membantu pemerintah daerah dan UPT untuk mendampingi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan daerah melalui proses identifikasi refleksi dan benahi. Dalam buku saku ini berisi tentang Indikator Prioritas SPM Bidang Pendidikan beserta penjelasannya.

Semoga buku saku ini dapat membantu pemerintah daerah untuk lebih memahami Indikator Prioritas SPM Bidang Pendidikan, dan memudahkan pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan daerah untuk pemenuhan indikator SPM bidang pendidikan yang berorientasi pada perbaikan mutu pendidikan.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya buku saku ini.

**Tim Penyusun
Tahun 2024**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I	
PENDAHULUAN	4
BAB II	
LANDASAN HUKUM	7
BAB III	
INDIKATOR PRIORITAS STANDAR PELAYANAN MINIMAL	9
a. Indikator Prioritas Provinsi	9
b. Indikator Prioritas Kabupaten/Kota	14
BAB IV	
INDIKATOR LAINNYA YANG PERLU DIPERHATIKAN PEMERINTAH DAERAH	19

BAB I

PENDAHULUAN



UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menetapkan fokus penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat. Pasal 298 (1) mengutamakan belanja daerah untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dengan Standar Pelayanan Minimal. Dalam konteks pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) meluncurkan Merdeka Belajar episode ke 19: Rapor Pendidikan Indonesia, berisi profil pendidikan yang digunakan sebagai dasar analisis, perencanaan, dan monitoring peningkatan kualitas pendidikan.

Kemendikbudristek dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan delapan indikator prioritas untuk provinsi dan kabupaten/kota pada Rapor Pendidikan sebagai dasar pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pendidikan. Indikator ini mencakup aspek seperti Angka Partisipasi Sekolah, Kompetensi Literasi, Kompetensi Numerasi, hingga Iklim Keamanan dan Inklusivitas. Dengan adanya Buku Saku Indikator Prioritas SPM Bidang Pendidikan, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih mudah menyusun perencanaan guna memenuhi Standar Pelayanan Minimal di bidang pendidikan.

Delapan indikator prioritas **provinsi** adalah (1) Angka Partisipasi Sekolah; (2) Kompetensi Literasi; (3) Kompetensi Numerasi; (4) Tingkat Penyerapan Lulusan SMK; (5) Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Lulusan SMK; (6) Iklim Keamanan; (7) Iklim Kebinekaan; dan (8) Iklim Inklusivitas.

Delapan indikator prioritas **kabupaten/kota** adalah (1) Angka Partisipasi Sekolah; (2) Kompetensi Literasi; (3) Kompetensi Numerasi; (4) Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B ; (5) Tingkat pertumbuhan pendidik PAUD S1 dan D IV; (6) Iklim Keamanan; (7) Iklim Kebinekaan; dan (8) Iklim Inklusivitas.

Indikator prioritas ini menjadi dasar Pemerintah Daerah dalam mengukur pemenuhan SPM bidang pendidikan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu disusun Buku Saku Indikator Prioritas SPM bidang pendidikan untuk memudahkan pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

Dalam Rapor Pendidikan Kemendikbudristek juga memberikan rekomendasi tambahan indikator yang bisa membantu daerah Untuk mengoptimalkan layanan pendidikannya. Indikator tambahan ini akan diusulkan dalam revisi Permendikbud No. 32 Tahun 2022. Tambahan indikator tersebut akan dijelaskan dalam buku saku ini.

Tujuan:

Buku Saku Indikator Prioritas SPM Bidang Pendidikan ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1

Meningkatkan pemahaman pemerintah daerah tentang indikator prioritas SPM bidang pendidikan.

2

Memudahkan pemerintah daerah melakukan proses identifikasi, refleksi, dan benahi dalam rangka menyusun perencanaan daerah

3

Membantu UPT dalam melakukan pendampingan perencanaan daerah



BAB II

LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 (1), menyebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
3. UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762)



5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 09 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan Oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Pelayanan Minimal
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 195 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal



BAB III

INDIKATOR PRIORITAS STANDAR PELAYANAN MINIMAL



Kemendikbudristek telah menetapkan indikator prioritas SPM bidang pendidikan dari indikator Rapor Pendidikan Tahun 2024 bagi pemerintah daerah sebagai indikator yang perlu diprioritaskan untuk dibenahi terlebih dahulu.

a. Indikator Prioritas Provinsi

INDIKATOR	SUMBER DATA
B.11 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak Usia 16-18 tahun Jumlah Warga Negara usia 16 - 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Badan Pusat Statistik)
DEFINISI	RENTANG NILAI
Definisi Konseptual Indikator: Partisipasi anak usia 16-18 tahun yang mengenyam pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan Definisi Operasional Indikator: Jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dibagi dengan jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada provinsi yang bersangkutan	0-100

INDIKATOR	SUMBER DATA
<p>B.14 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 4 - 18 tahun Penyandang Disabilitas</p> <p>Jumlah Warga Negara usia 4 - 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus</p>	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Badan Pusat Statistik)
DEFINISI	RENTANG NILAI
<p>Definisi Konseptual Indikator: Partisipasi anak disabilitas usia 4-18 tahun yang mengenyam pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan</p> <p>Definisi Operasional Indikator: Jumlah anak disabilitas usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dibagi dengan jumlah anak disabilitas usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada kab/kota yang bersangkutan</p>	0-100

INDIKATOR	SUMBER DATA
<p>A.1 Skor Kemampuan Literasi</p> <p>Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional (pada Jenis Pelayanan Dasar: Pendidikan Menengah)</p>	Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi)
DEFINISI	RENTANG NILAI
<p>Definisi Konseptual Indikator: Kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat.</p> <p>Definisi Operasional Indikator: Nilai rerata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi).</p>	0-100

INDIKATOR	SUMBER DATA
<p>A.2 Skor Kemampuan Numerasi</p> <p>Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional (pada Jenis Pelayanan Dasar: Pendidikan Menengah)</p>	<p>Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi)</p>
DEFINISI	RENTANG NILAI
<p>Definisi Konseptual Indikator: Kemampuan peserta didik dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia.</p> <p>Definisi Operasional Indikator: Nilai rerata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.</p>	<p>0-100</p>

INDIKATOR	SUMBER DATA
<p>A.4 Penyerapan Lulusan SMK</p> <p>Tingkat Penyerapan Lulusan SMK</p>	<p><i>Tracer Study</i> (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi).</p>
DEFINISI	RENTANG NILAI
<p>Definisi Konseptual Indikator: Lulusan SMK yang bekerja, berwirausaha, dan/atau melanjutkan studi satu tahun pasca lulus.</p> <p>Definisi Operasional Indikator: Estimasi penyerapan lulusan SMK berdasarkan sampel di daerah</p>	<p>0-100</p>

INDIKATOR	SUMBER DATA
<p>A.6.2 Kepuasan Dunia Kerja pada budaya kerja lulusan SMK</p> <p>Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK</p>	<p><i>Tracer Study</i> (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi)</p>
DEFINISI	RENTANG NILAI
<p>Definisi Konseptual Indikator: Kepuasan dunia kerja terhadap kompetensi lulusan SMK</p> <p>Definisi Operasional Indikator: Estimasi persentase kepuasan dunia kerja terhadap kompetensi lulusan SMK berdasarkan sampel di daerah</p>	<p>0-100</p>

INDIKATOR	SUMBER DATA
<p>D.4 Iklm Keamanan</p> <p>Indeks Iklm Keamanan Di Satuan Pendidikan</p>	<p>Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi)</p>
DEFINISI	RENTANG NILAI
<p>Definisi Konseptual Indikator: Tingkat rasa aman dan kenyamanan peserta didik dari hal rasa aman disatuan pendidikan, perundungan, hukuman fisik, pelecehan seksual, dan aktivitas narkoba di lingkungan satuan pendidikan</p> <p>Definisi Operasional Indikator: Nilai rerata iklim keamanan terkait kesejahteraan psikologis, dan rasa aman terhadap perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, rokok, minuman keras, dan narkoba berdasarkan survei lingkungan belajar</p>	<p>0-100</p>

INDIKATOR	SUMBER DATA
<p>D.8 Iklm kebinekaan</p> <p>Indeks Iklm Kebinekaan di Satuan Pendidikan</p>	Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi)
DEFINISI	RENTANG NILAI
<p>Definisi Konseptual Indikator: Kondisi satuan pendidikan yang menunjukkan adanya sikap dan perilaku kepala satuan pendidikan dan guru dalam menerapkan toleransi agama dan budaya serta komitmen kebangsaan.</p> <p>Definisi Operasional Indikator: Nilai rerata iklim kebinekaan berdasarkan survei lingkungan belajar</p>	0-100

INDIKATOR	SUMBER DATA
<p>D.10 Iklm Inklusivitas</p> <p>Indeks Iklm Inklusivitas di Satuan Pendidikan</p>	Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi)
DEFINISI	RENTANG NILAI
<p>Definisi Konseptual Indikator: Iklim inklusivitas menyangkut bagaimana lingkungan satuan pendidikan menyikapi keragaman seperti perbedaan individu, identitas, maupun latar belakang sosial-budaya</p> <p>Definisi Operasional Indikator: Nilai rerata iklim inklusivitas meliputi layanan disabilitas, CBI, sikap terhadap disabilitas, dan fasilitas satuan pendidikan disabilitas berdasarkan survei lingkungan belajar</p>	0-100

b. Indikator Prioritas Kabupaten/Kota

INDIKATOR	SUMBER DATA
<p>B.10 Indikator PAUD Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 5-6 tahun</p> <p>Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD</p>	<p>Survei Sosial Ekonomi Nasional (Badan Pusat Statistik)</p>
DEFINISI	RENTANG NILAI
<p>Definisi Konseptual Indikator: Partisipasi anak usia 5-6 tahun yang mengenyam pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan.</p> <p>Definisi Operasional Indikator: Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dibagi dengan jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada Kab/Kota yang bersangkutan</p>	<p>0-100</p>

INDIKATOR	SUMBER DATA
<p>B.13 Indikator Dasmen Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7 - 15 tahun</p> <p>Jumlah Warga Negara usia 7 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar</p>	<p>Survei Sosial Ekonomi Nasional (Badan Pusat Statistik)</p>
DEFINISI	RENTANG NILAI
<p>Definisi Konseptual Indikator: Partisipasi anak usia 7-15 tahun yang mengenyam pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan</p> <p>Definisi Operasional Indikator: Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dibagi dengan jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada kab/kota yang bersangkutan</p>	<p>0-100</p>

INDIKATOR	SUMBER DATA
<p>B.15 Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7 - 18 Kesetaraan</p> <p>Jumlah warga negara 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (*)</p>	Data Pokok Pendidikan, Survei Sosial Ekonomi Nasional
DEFINISI	RENTANG NILAI
<p>Definisi Konseptual Indikator: Partisipasi anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang mengenyam pendidikan pada pendidikan kesetaraan</p> <p>Definisi Operasional Indikator: Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan</p>	0-100

INDIKATOR	SUMBER DATA
<p>A.1 Skor Kemampuan Literasi</p> <p>Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan asesmen nasional (pada jenis pelayanan dasar: pendidikan dasar)</p>	Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi)
DEFINISI	RENTANG NILAI
<p>Definisi Konseptual Indikator: Kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat.</p> <p>Definisi Operasional Indikator: Nilai rerata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi).</p>	0-100

INDIKATOR	SUMBER DATA
<p>A.2 Skor Kemampuan Numerasi</p> <p>Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan asesmen nasional (pada jenis pelayanan dasar: pendidikan dasar)</p>	<p>Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi)</p>
DEFINISI	RENTANG NILAI
<p>Definisi Konseptual Indikator: Kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat.</p> <p>Definisi Operasional Indikator: Nilai rerata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.</p>	<p>0-100</p>

INDIKATOR	SUMBER DATA
<p>B.8 Indikator PAUD Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B</p> <p>Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B</p>	<p>Data Hasil Akreditasi dari BAN PDM (Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah)</p>
DEFINISI	RENTANG NILAI
<p>Definisi Konseptual Indikator: Satuan PAUD yang sudah melalui evaluasi kelayakan. Evaluasi kelayakan dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) PAUD-PNF dan instrumen akreditasi mengacu pada Keputusan Menteri No.71/P/2021. Instrumen akreditasi disusun berdasarkan penerjemahan terhadap Standar Nasional Pendidikan.</p> <p>Definisi Operasional Indikator: Persentase jumlah satuan PAUD yang terakreditasi minimal B terhadap satuan PAUD yang sudah diakreditasi di kota/kabupaten.</p>	<p>0-100</p>

INDIKATOR	SUMBER DATA
<p>C.1 Indikator PAUD Proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi S1 / D4</p> <p>Pertumbuhan pendidik PAUD dengan S1/D IV</p>	Data Pokok Pendidikan (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi)
DEFINISI	RENTANG NILAI
<p>Definisi Konseptual Indikator: Pendidik PAUD pada satuan pendidikan formal yang telah memiliki kualifikasi minimum S1/D-IV sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Guru Dan Dosen.</p> <p>Definisi Operasional Indikator: Persentase jumlah guru PAUD formal berijazah S1/D4 di kota/kabupaten.</p>	0-100

INDIKATOR	SUMBER DATA
<p>D.4 Indikator Dasmen Iklm Keamanan</p> <p>Indeks Iklm Keamanan di Satuan Pendidikan</p>	Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi)
DEFINISI	RENTANG NILAI
<p>Definisi Konseptual Indikator: Tingkat rasa aman dan kenyamanan peserta didik dari hal rasa aman disatuan pendidikan, perundungan, hukuman fisik, pelecehan seksual, dan aktivitas narkoba di lingkungan satuan pendidikan</p> <p>Definisi Operasional Indikator: Nilai rerata iklim keamanan terkait kesejahteraan psikologis, dan rasa aman terhadap perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, rokok, minuman keras, dan narkoba berdasarkan survei lingkungan belajar</p>	0-100

INDIKATOR	SUMBER DATA
D.8 Iklm Kebinekaan Indeks Iklm Kebinekaan di Satuan Pendidikan	Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi)
DEFINISI	RENTANG NILAI
Definisi Konseptual Indikator: Kondisi satuan pendidikan yang menunjukkan adanya sikap dan perilaku kepala satuan pendidikan dan guru dalam menerapkan toleransi agama dan budaya serta komitmen kebangsaan. Definisi Operasional Indikator: Nilai rerata iklim kebhinekaan berdasarkan survei lingkungan belajar	0-100

INDIKATOR	SUMBER DATA
D.10 Iklm Inklusivitas Indeks Iklm Inklusivitas di Satuan Pendidikan	Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi)
DEFINISI	RENTANG NILAI
Definisi Konseptual Indikator: Iklim inklusivitas menyangkut bagaimana lingkungan satuan pendidikan menyikapi keragaman seperti perbedaan individu, identitas, maupun latar belakang sosial-budaya Definisi Operasional Indikator: Nilai rerata iklim inklusivitas meliputi layanan disabilitas, CBI, sikap terhadap disabilitas, dan fasilitas satuan pendidikan disabilitas berdasarkan survei lingkungan belajar	0-100

Catatan:

Kemendikbudristek telah menetapkan indikator prioritas SPM bidang pendidikan dari indikator Rapor Pendidikan Tahun 2024 bagi pemerintah daerah sebagai indikator yang perlu diprioritaskan untuk dibenahi terlebih dahulu.

BAB IV

INDIKATOR LAINNYA YANG PERLU DIPERHATIKAN PEMERINTAH DAERAH

Berdasarkan arah kebijakan terbaru dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terdapat tambahan indikator yang perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah. Beberapa indikator tersebut penting karena dapat mewakili kualitas pendidikan di tingkat daerah dan menjadi fokus arah perencanaan bidang pendidikan di daerah. Beberapa indikator tersebut berpeluang menjadi indikator prioritas SPM bagi pemerintah daerah di waktu mendatang. Sebagai catatan, saat ini Pemerintah Daerah hanya dapat mengalokasikan perencanaan untuk indikator tambahan tersebut melalui Akar Masalah pada indikator prioritas SPM yang tercantum dalam Permendagri No. 59 Tahun 2021.

Pada indikator untuk A.1. Kemampuan Literasi dan A.2. Kemampuan Numerasi perlu diperhatikan bahwa tersedia dua jenis capaian, yaitu capaian dalam bentuk skor dan capaian dalam bentuk persentase. Tujuan dari kedua jenis capaian ini adalah memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang kondisi kemampuan literasi dan numerasi di setiap satuan pendidikan di wilayah masing-masing. Hal ini bertujuan untuk mendukung pemerintah daerah dalam memberikan intervensi untuk perbaikan perbaikan dan sebagai hasil capaian untuk pemenuhan indikator kinerja daerah.

Tambahan indikator A.1. Kemampuan Literasi dan A.2. Kemampuan Numerasi dalam bentuk persentase dijabarkan dalam tabel di bawah ini.

INDIKATOR	SUMBER DATA
A.1 Persen Kemampuan Literasi	Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi)
DEFINISI	RENTANG NILAI
<p>Definisi Konseptual Indikator: Kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat</p> <p>Definisi Operasional Indikator: Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi).</p>	0-100

INDIKATOR	SUMBER DATA
A.2 Persen Kemampuan Numerasi	Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi)
DEFINISI	RENTANG NILAI
<p>Definisi Konseptual Indikator: Kemampuan peserta didik dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia.</p> <p>Definisi Operasional Indikator: Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.</p>	0-100

Adapun untuk tambahan indikator lain dijabarkan pada tabel di bawah ini

INDIKATOR	SUMBER DATA
<p>C.9. Proporsi Guru Penggerak yang diangkat menjadi KS/PS</p>	<p>1. Satudata 2. Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan 3. Sistem Informasi Manajemen Tenaga Kependidikan</p>
DEFINISI	RENTANG NILAI
<p>Definisi Konseptual Indikator: Pendidikan Guru Penggerak adalah program kepemimpinan pembelajaran di mana guru dipersiapkan untuk menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah guna mentransformasi satuan pendidikan demi layanan pembelajaran yang berkualitas dan berpihak kepada murid.</p> <p>Melihat jumlah pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah dari unsur guru penggerak yang telah memenuhi syarat menjadi kepala sekolah maupun pengawas sekolah sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan negeri sesuai kewenangan pemerintah daerah</p> <p>Definisi Operasional Indikator: Persentase jumlah guru penggerak di sekolah negeri yang memenuhi syarat yang telah diangkat menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah berdasarkan kewenangan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota</p>	<p>0-100</p>

INDIKATOR	SUMBER DATA
D1. Kualitas pembelajaran	Asesmen Nasional
DEFINISI	RENTANG NILAI
<p>Definisi Konseptual Indikator: Tingkat kualitas interaksi antara guru, peserta didik, dan materi pembelajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran</p> <p>Definisi Operasional Indikator: Nilai rerata untuk kualitas pembelajaran meliputi manajemen kelas, dukungan psikologi, dan metode pembelajaran di survei lingkungan belajar</p>	0-100